

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA SEKSI  
EKSTENSIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CAKUNG SATU  
DI JAKARTA TIMUR**

**HELLEN OCTAVIA  
8105108079**



**Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI  
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2013**

## **ABSTRAK**

*Hellen Octavia. 8105108079. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pada Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu, Jakarta Timur. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Desember 2013.*

*Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis oleh Praktikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa.*

*Tujuan dilaksanakan PKL adalah membina dan meningkatkan hubungan kerja sama antar pihak UNJ dan pihak lembaga, agar mahasiswa dapat memperoleh keterampilan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Perpajakan. PKL dilaksanakan pada KPP Pratama Cakung Satu yang beralamat di Jl. Pulo Buaran IV Blok JJ No. 1 KIP, Jakarta Timur, 13940, (021)-46826686. Selama satu bulan dari tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan 25 Juli 2013.*

*Pada masa-masa awal praktek kerja lapangan, praktikan menghadapi kendala untuk beradaptasi dengan para pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cakung Satu. Untuk mengatasi kendala tersebut praktikan mencoba untuk lebih sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan para pegawai agar suasana kerja menjadi lebih nyaman.*

*Penulisan laporan ini bertujuan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama masa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan untuk menganalisis kendala-kendala yang terjadi selama masa tersebut. Selain itu juga untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Jakarta jurusan Ekonomi dan Administrasi.*

*Penulisan laporan ini juga menunjukkan manfaat dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah sehingga dapat diterapkan dalam dunia kerja secara nyata. Selain itu praktikan juga dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga mendapatkan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk memasuki dunia kerja kelak.*

*Dalam laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cakung Satu yang ditempatkan di seksi Ekstensifikasi.*


*Kata Kunci: KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, Ekonomi, Pajak*

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR  
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Judul : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA  
SEKSI EKSTENSIFIKASI DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA CAKUNG SATU DI JAKARTA TIMUR

Nama Praktikan : Hellen Octavia  
Nomor Registrasi : 8105108079  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
Konsentrasi : Pendidikan Ekonomi Koperasi  
Jurusan : Ekonomi dan Administrasi


Menyetujui,  
Ketua Pendidikan Ekonomi,

  
Dr. Saparuddin, SE, M.Si.  
NIP. 1977011552005011001

Dosen Pembimbing,

  
Ari Saptono, SE, MPd  
NIP. 1972071520011211001

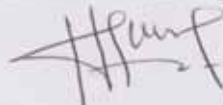
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi

  
Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si.  
NIP. 19661030 2000121 001

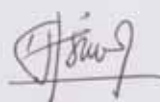


Seminar Pada Tanggal:  
Senin, 23 Desember 2015

**LEMBAR PENGESAHAN**

Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si.  
NIP. 19661030 2000121 001

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP. 197201141998022001	 .....	6/1 '14 .....
Penguji		
<u>Dra. Rd Tuty Sariwulan, M.Si</u> NIP. 195807221986032001	 .....	6/1 '14 .....
Dosen Pembimbing		
<u>Ari Saptono, SE, MPd</u> NIP.1972071520011211001	 .....	7/1 '14 .....

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap kegiatan PKL yang telah dilaksanakan selama satu bulan. Dari pelaksanaan PKL dapat disimpulkan bahwa penulis mendapat wawasan serta pengetahuan di bidang perpajakan yang berguna bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pak Ari Saptono, S.Pd. selaku Dosen Pembimbing Laporan PKL yang telah membantu memberikan saran serta berbagai perbaikan demi tersusunnya laporan ini dengan baik.
2. Pak Rizaldi Kurniawan Ridwan, selaku Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
3. Pak Irvan, selaku Kasubbag Umum KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

4. Pak Riyadi Hari Prasetya, selaku Sekretaris di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
5. Seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, khususnya staf Sub Bagian Umum yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah memberika bantuan dan masukan selama praktikan PKL.
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orangtua yang tak henti memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis berharap saran serta kritik yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan.....	1
B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan.....	4
C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan.....	5
D. Tempat Praktek Kerja Lapangan.....	6
E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan.....	6

### **BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

A. Sejarah Perusahaan.....	8
B. Struktur Organisasi.....	14

C. Kegiatan Umum Perusahaan.....	23
----------------------------------	----

### **BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

A. Bidang Kerja.....	25
B. Pelaksanaan Kerja.....	31
C. Kendala Yang Dihadapi.....	41
D. Cara Mengatasi Kendala.....	42

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA	49
----------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang PKL**

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia, terus berupaya untuk dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang berkualitas tersebut bukan hanya mahasiswa yang dapat memiliki pengetahuan serta wawasan luas namun juga mahasiswa yang dapat menerapkan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam bentuk nyata di dunia kerja sebagai bentuk kontribusi kepada Indonesia sehingga mahasiswa lulusan UNJ diharapkan dapat membawa citra UNJ menjadi lebih baik di mata masyarakat.

Perlu adanya pengembangan diri agar lebih kompeten pada bidangnya masing-masing. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dibidangnya. Guna memenangkan persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Semua itu dapat dikembangkan oleh mahasiswa melalui proses pembelajaran pada bangku kuliah ataupun melalui buku-buku dan sebagainya. Akan tetapi, meskipun seseorang berasal dari latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi jika ia tidak berkompeten dibidangnya dan tidak memiliki keahlian lain yang dapat menunjang karirnya, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk memasuki dunia kerja. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kegiatan mahasiswa di masyarakat diperlukan adanya suatu kegiatan yang bertujuan untuk melatih dan mendidik

mahasiswa, diantaranya kegiatan yang sangat membangun mahasiswa dengan diadakannya Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari mata kuliah yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, UNJ. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengaplikasian ilmu-ilmu secara teoritis yang telah didapat selama perkuliahan yang pengimplementasiannya dilakukan dalam kegiatan PKL tersebut, salah satu ilmu serta teori yang akan diaplikasikan di tempat PKL sesuai dengan latar belakang pendidikan praktikan adalah menganalisis sistem perpajakan yang berjalan pada perusahaan/instansi pemerintah. Kegiatan ini pula diharapkan dapat memupuk disiplin kerja dan profesionalisme dalam bekerja agar dapat mengenal dunia atau lingkungan kerja yang diharapkan akan bermanfaat bagi mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan.

Pengembangan kemampuan mahasiswa selain dapat dilakukan dengan memberikan kuliah-kuliah di dalam kelas, juga dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan praktek kerja yang sesuai dengan ilmu yang telah diperolehnya di dalam kelas. Untuk itulah diadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan dan berlatih untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatnya di bangku kuliah dalam lingkungan kerja secara nyata.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan sesuai dengan kebutuhan konsentrasi setiap mahasiswa. Selain untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa, Praktek Kerja Lapangan (PKL) juga bermanfaat untuk

menciptakan suatu kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan instansi swasta ataupun pemerintahan tempat mahasiswa melakukan praktek. Sehingga nama baik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang dibawa oleh praktikan dapat memberi pengaruh positif dengan diterimanya lulusan-lulusan Universitas negeri jakarta (UNJ) di instansi yang bersangkutan.

## **B. Maksud dan Tujuan PKL**

Maksud yang hendak dicapai dalam kegiatan PKL antara lain adalah untuk:

1. Mengaplikasikan, menerapkan, dan membandingkan pengetahuan akademis yang telah didapatkan selama perkuliahan.
2. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja.
3. Melatih praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
4. melaksanakan PKL sesuai dengan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan yaitu mengenai bidang perpajakan.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan PKL antara lain bertujuan untuk:

1. Untuk menjalankan kewajiban Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan mata kuliah prasyarat wajib bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2. Untuk mendapatkan pengalaman kerja sebagai modal sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
3. Untuk menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapatkan, dengan kontribusi pada instansi, secara jelas dan konsisten, serta dengan komitmen yang tinggi.
4. Untuk memperoleh data dan informasi tentang KPP Pratama Cakung Satu yang berguna sebagai bahan pembuatan laporan PKL.

### **C. Kegunaan PKL**

Manfaat yang diperoleh setelah melaksanakan kegiatan PKL diharapkan dapat berguna:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia kerja.
  - b. Mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah dengan dunia kerja nyata.
  - c. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan bagi praktikan dalam melakukan setiap pekerjaan.
2. Bagi Fakultas Ekonomi
  - a. Menjalin kerja sama dan mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya, sehingga dapat mewujudkan

konsep link and match dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja.

- b. Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi dalam rangka pengembangan program studi.
- c. Mengukur seberapa besar peran tenaga pengajar dalam memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia kerja.

### 3. Bagi Instansi

- a. Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
- b. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat.
- c. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama masa Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung.

### **D. Tempat PKL**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan praktikan di:

nama instansi : KPP Pratama Jakarta Cakung Satu  
alamat : Jl. Pulo Buaran IV Blok JJ KIP, Jakarta Timur

no. telp : (021)-5703798

Bagian : Seksi Ekstensifikasi

Praktikan memilih KPP Pratama Jakarta Cakung Satukarena praktikan ingin mengetahui bagaimana sistem perpajakan yang ada didalam KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tersebut. Disamping itu, praktikan merasa tertarik untuk mengaplikasikan ilmunya dalam Bidang Ekonomi pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

#### **E. Jadwal Waktu PKL**

Kegiatan PKL yang dilaksanakan praktikan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

##### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan dimulai bulan Maret praktikan mendatangi tempat PKL untuk mencari tahu adanya kemungkinan praktikan dapat melaksanakan PKL di tempat tersebut. Praktikan menemui bagian Subbag Umum dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cakung Satu untuk menanyakan hal mengenai pelaksanaan PKL.

Setelah menetapkan pilihan dimana tempat praktikan akan melaksanakan PKL, maka praktikan segera membuat surat permohonan izin PKL ke BAAK dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Kepala Konsentrasi pada tanggal 11 Maret 2013.

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat adalah 3 (tiga) hari pada tanggal 22 maret 2013 Psetelah surat tersebut jadi pada tanggal 25 Maret 2013. Lalu praktikan mengantarkan surat tersebut ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di Jl. Pulo Buaran IV Blok JJ KIP, Jakarta Timur pada bulan April.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap pelaksanaan PKL dilakukan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan 25 Juli 2013, Dengan waktu kerja sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai Jumat. Ketentuan PKL di KPP Pratama Pulogadung, yaitu:

Masuk Kerja : 07.30 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Istirahat Jumat : 11.30 – 13.00 WIB

Pulang : 17.00 WIB

## 3. Tahap Penyusunan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama 1 bulan, praktikan memiliki suatu kewajiban kepada Fakultas Ekonomi untuk memberikan laporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan di tempat praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Kegiatan pada tahap penyusunan laporan PKL dimulai dari tanggal 26 Juli 2013 hingga 10 Desember 2013 dengan revisi pada bulan Desember 2013.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL**

#### **A. Sejarah Perusahaan**

Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya, mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;
2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan
4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeida diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-



undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

1924 – Djawatan Padjak dibawah Departemen Van Financien berdasar Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3

1942 – Djawatan Padjak dibawah Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan Padjak Hasil Bumi)

1945 – berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak

1950 – Djawatan Padjak dibawah Direktur Iuran Negara

1958 – Djawatan Padjak dibawah vertikal langsung Departemen Keuangan

1964 – Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak dibawah pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara

1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter

1966 – Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak

1976 – Direktorat IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak

1983 – Tax Reform I berlakunya Self Assesment

1985 – IPEDA berganti nama menjadi Direktorat PBB

2000 – Tax Reform II

2002 – Modernisasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

### **1. Pra Proklamasi Kemerdekaan RI**

Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.

Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.

### **2. Periode 1945-1959**

Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau

peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia.

Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 November 1945 No. 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bagian Pajak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1. Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara

### **3. Periode 1960-1994**

Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan, dan Direktorat Pembinaan Wilayah.

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. KMK-443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 mengenai organisasi dan tata kerja Kanwil DJP, KPP, KPPBB, Karikpa, dan KP4, kantor-kantor wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan berada dibawah supervisi

Kanwil DJP Jakarta Raya III. Pada tahun 2003 terjadi perubahan struktur organisasi, sehingga kanwil DJP Jakarta Raya III dipecah menjadi 2 (dua) yaitu menjadi Kanwil DJP Jakarta III yang membawahi kantor-kantor di wilayah Jakarta Selatan dan Kanwil DJP Jakarta IV yang membawahi kantor-kantor di wilayah DJP Jakarta Timur.

Setelah ditetapkannya sistem administrasi modern, Kanwil DJP Jakarta IV berubah menjadi Kanwil DJP Jakarta Timur, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal.

KPP Pratama Cakung Satu membawahi tiga kelurahan di dalam satu kecamatan cakung, yaitu:

1. Jatinegara
2. Penggilingan
3. Rawa Teratai

**VISI dan MISI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama(KPP) Cakung Satu**

**VISI:**

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan yang dipercaya dan di banggakan oleh masyarakat.

**MISI:**

**FISKAL** : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

**EKONOMI** : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan *minimizing distortion*.

**POLITIK** : Mendukung proses demokratisasi.

**KELEMBAGAAN** : Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

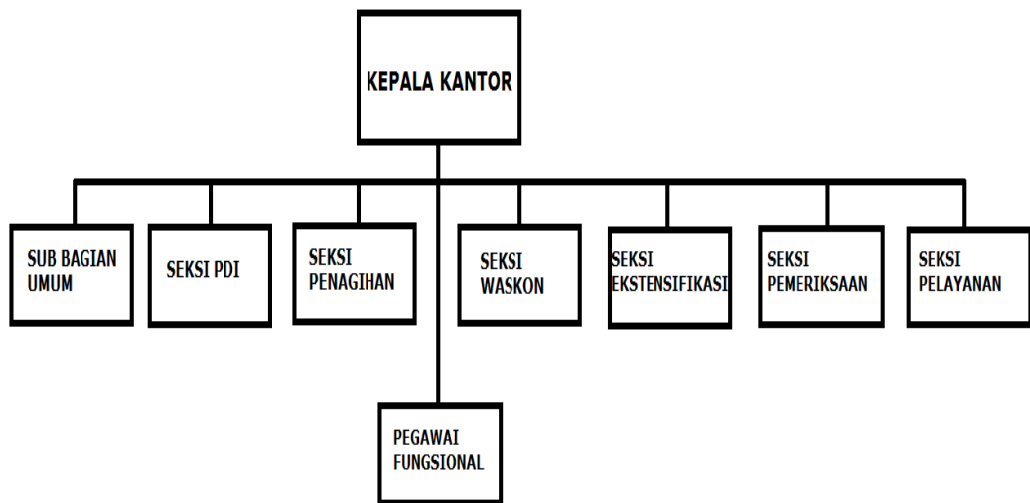
## B. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi, badan usaha, ataupun instansi membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian secara sistematis yang ada pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikordinasikan secara formal.<sup>1</sup> Struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cakung Satu sudah menerapkan struktur organisasi yang berdasarkan fungsi dan spesialisasi, memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai, dan tata kerja yang transparan.

Dan sesuai dengan Lampiran : I-11 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 535/KM.1/2001 tanggal 14 November 2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cakung Satu adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> -pengertian struktur organisasi, [http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur\\_organisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi). (Diakses tanggal 7 November 2013)



**Gambar II.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Cakung Satu**

**Sumber : KPP Pratama Cakung Satu**

Adapun deskripsi mengenai tugas dari setiap seksi di KPP Pratama Cakung Satu adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Kantor

Mengingat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karikpa maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak (WP) dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang kepala kantor terletak di lantai 2 gedung

KPP Pratama Cakung Satu.SaatiniKepala Kantor di KPP  
PratamaCakungSatudijabatolehRizaldiKurniawanRidwan.

## 2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Tugas Kepala Sub Bagian Umum :

1. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan dan pengiriman surat-surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan.
2. Mendistribusikan surat-surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar kepada instansi terkait.
3. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
4. Memberi nasehat dan menegakkan disiplin pegawai bawahan
5. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

Sub BagianUmumdiketuaiolehIrvan RY,  
sedangkanKasiSekretariatdijabatoleh Nelly Lynce.

## 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi perpajakan (PDI)

Tugas Seksi PDI :

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan
- b. Penyajian informasi perpajakan



- c. Perekaman dokumen perpajakan
- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- e. Pengalokasian pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- f. Pelayanan dukungan teknis komputer
- g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling
- h. Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

KepalaSeksi (Kasi) PDI dijabatolehHoslinda.

#### 4. Seksi Penagihan

Tugas seksi penagihan :

- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak & memproses permohonan pengangsuran pajak
- b. Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak
- c. Penagihan aktif
- d. Mengusulkan penghapusan piutang pajak
- e. Penyimpanan dokumen - dokumen penagihan

Jurusita Pajak :

Jurusita pajak adalah pelaksana pada KPP yang telah mendapat pendidikan khusus berkaitan dengan penagihan dan penyitaan pajak.

Tugas Jurusita Pajak :

Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika Dan Sekaligus (SPPSS)

- 1) Memberitahukan Surat Paksa (SP)
- 2) Melaksanakan penyitaan barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
- 3) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- 4) Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan memperlihatkan kepada penanggung pajak.

KepalaSeksi (Kasi) PenagihandijabatolehDaniMeisa.

##### 5. Seksi pengawasan dan Konsultasi ( Waskon )

Tugas Seksi Waskon :

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak terdaftar
- b. Memberikan bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Menganalisis kinerja wajib pajak
- e. Melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan banding.

Seksi Waskon di KPP Pratama Cakung Satu dibagi menjadi empat. Seksi Waskon I yang diketuai oleh Wawan Hendratno, Seksi Waskon II yang diketuai oleh Agus Syaifudin, Seksi Waskon III yang diketuai oleh Ronald Sinaga, dan yang terakhir Seksi Waskon IV yang diketuai oleh Muslimin Mapellawa.

Dalam organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdapat jabatan *Account Representative* (Staff Pendukung Pelayanan) yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

*Account Representative* (AR) merupakan Petugas di Kantor Pajak, yang memantau keadaan wajib pajak sebagai penghubung dan tempat konsultasi antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak. Keberadaan *Account representative* (AR) merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan dilayani oleh *Account Representative* (AR) yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin keterbukaan.

*Account Representative* (AR) berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada

Tugas *Account Representative* (AR) :

- a. Melayani penyelesaian permohonan restitusi PPN.
- b. Melayani penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).

- c. Melayani penyelesaian permohonan legalisasi ijin prinsip pembebasan PPh pasal 22 impor.
- d. Melayani penyelesaian surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh pasal 22 impor .

Jangka waktu penyelesaian :

- a. 2 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap
- b. 4 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap.
- c. 12 bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap.
- d. 3 minggu sejak SKPLB diterbitkan atau 3 minggu sejak permohonan diterima secara lengkap.
- e. 3 minggu sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- f. 5 hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

#### 6. Seksi Ekstensifikasi

Tugas Seksi Ekstensifikasi :

- a. Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.

SuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor SE.06/PJ.9/2001  
tanggal 11 Juli 2001  
mengenaipelaksanaanekstensifikasiWajibPajakdanintensifikasipaja  
k.

PeraturanDirekturJenderalPajakNomor PER-16/PJ/2007  
tanggal 25 Januari 2007  
tentangPemberianNomorPokokWajibPajak Orang Pribadi yang  
BerstatussebagaiPengurus, Komisariss,

Pemegang Saham atau Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah, termasuk Kegiatan *Multi Level Marketing*, Pemasok dan sejenisnya.

b. Pendataan objek dan subjek pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui yang melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Tempat Perdagangan dan/atau Pertokoan.

c. Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

Ekstensifikasi wajib pajak berguna untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Sedangkan intensifikasi pajak berguna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar, ataupun Wajib Pajak baru dari hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Di dalam Seksi Ekstensifikasi terdapat Kepala Seksi (Kasi) dan Petugas Seksi Ekstens di manapraktikan di tempat. Kepala Seksi (Kasi) Ekstensifikasi dijabat oleh Riyadi Hari Prasetya.

7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Tugas Seksi Pemeriksaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.

- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pemeriksa dijabat oleh Suryawan.

## 8. Seksi Pelayanan

Tugas Seksi Pelayanan :

- a. Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan
- c. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya
- d. Memberikan penyuluhan perpajakan
- e. Melaksanakan registrasi wajib pajak
- f. Melakukan kerja sama perpajakan

## 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta I atau Kepala KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

### **C. Kegiatan Umum Perusahaan**

Secara umum kegiatan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama(KPP) Cakung Satu, adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
7. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
8. Pengurangan sanksi pajak.
9. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
10. Pelaksanaan administrasi KP.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Bidang Pekerjaan**

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Cakung Satu praktikanditempatkan pada Seksi Ekstensifikasi.

Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.<sup>2</sup>

Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Dasar Peraturannya adalah :

- a. Per-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

---

<sup>2</sup> -pengertian ekstensifikasi perpajakan [http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensifikasi\\_pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensifikasi_pajak) (Di akses 26 Desember 2013)



- b. Per-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah melalui Per-32/PJ/2008.
- c. Per-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.<sup>3</sup>

Dari peraturan diatas, pegawai seksi ekstensifikasi bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, singkatnya yaitu mencari potensi wajib pajak, mendata, dan melakukan perluasan potensi dari wajib pajak

Adapun bidang kerja yang dilakukan pada Seksi Ekstensifikasi adalah:

1. Tugas pokok :

- a. Melakukan pengamatan dan penggalan potensi perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007  
tanggal 25 Januari 2007  
tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang  
Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris,  
Pemegang Saham atau Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja atau  
Bendaharawan Pemerintah, termasuk Kegiatan Multi Level  
Marketing, Pemasok dan sejenisnya.<sup>4</sup>

Pegawai Seksi  
Ekstensifikasi bekerjasama dengan Pemda biasanya berkaitan dengan  
identitas Wajib Pajak,  
selain itu juga untuk mendapatkan kemudahan apabila melakukan sosia

---

<sup>3</sup>ibid

<sup>4</sup>ibid

lisasi perpajakan. Dengan pengelola perkantoran, KPP bisamencaritahukemungkinanadanyapotensiWajibPajakbaru di kantor-kantortersebut.

Seksi Ekstensifikasi melakukan *canvassing* (penyisiran), sosialisasiperpajakankemasyarakat. *Canvassing* adalah kegiatan penyisiran yang dilakukan di pusatperdaganganataupertokoangunamencariWajibPajak yang belumterdaftar.<sup>5</sup>

Pencarian potensi wajib pajak dapat dilakukan oleh seksi ekstensifikasi disekolah, perusahaan industri, instansi pemerintahan, pasar, dan masyarakat melalui kantor kelurahan setempat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan yakni :

- 1) Disekolah, dilakukan sosialisasi berupa seminar terhadap petinggi sekolah seperti ketua yayasan atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf TU, guru-guru dan perwakilan orang tua murid. Seminar disekolah dilakukan pada saat dana BOS masuk ke sekolah tersebut, hal ini agar pihak sekolah mengetahui bahwa adanya aspek perpajakan dalam penggunaan dana BOS.
- 2) Perusahaan, dilakukan sosialisasi berupa seminar terhadap petinggi perusahaan dan karyawan baru

---

<sup>5</sup>-Surat edaran <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15147> (diakses 26 desember 2013)

maupun lama. Sosialisasinya berupa seminar pada saat perekrutan karyawan baru, isi seminar menyampaikan bahwa penghasilan yang diperoleh diharapkan sudah terpotong pajak untuk pembangunan negara.

- 3) Masyarakat, sosialisasi dilakukan di kantor kelurahan setempat, dimasyarakat inilah yang sangat kurang sekali informasi tentang perpajakan, disini masyarakat yang berpotensi wajib pajak diwajibkan mempunyai NPWP, banyak masyarakat yang enggan memiliki NPWP, dikarenakan takut membayar pajaknya besar, maka dari itu dilakukan penyuluhan agar masyarakat cerdas dalam memahami pajak, dalam pembayaran pajak dilakukan sangatlah terbuka dan transparan, dan selain itu bila memang tidak berpenghasilan maka pajak yang diperoleh adalah nihil, dan pemilikan NPWP untuk masyarakat biasanya untuk mempermudah KMS (kegiatan membangun sendiri) bila ada KMS maka wajib pajak tersebut harus mempunyai NPWP, bila sudah dihimbau tetapi tidak juga memiliki NPWP, maka wajib pajak tersebut dibuatkan NPWP secara jabatan (paksaan).

b. Pendataan objek dan subjek pajak

Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan di kantor pajak dengan memasukan data secara online dan saring kembali data tersebut untuk dilakukan penghimpunan pembuatan NPWP. Pembuatan NPWP bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak dimana pun berada secara online, meskipun tidak semua wajib pajak ingin membuat NPWP sendiri. Maka seksi ekstensifikasi yang bertugas membuat NPWP setelah selesai melakukan pengamatan.

Sesuai dengan Per-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pojok Wajib Pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.<sup>6</sup>

Banyak manfaat yang diperoleh dari pemilikan NPWP yaitu, mempermudah untuk pengajuan kredit, memudahkan untuk melakukan transaksi sesuai batas jumlah yang ditentukan, mendapat dispensasi apabila anda akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

c. Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

Ekstensifikasi wajib pajak berguna untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP.

---

<sup>6</sup>ibid

Per-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah melalui Per-32/PJ/2008.<sup>7</sup>

Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi ini berbeda dengan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dapat diketahui untuk perihal tentang PBB sudah tidak merupakan tanggung jawab Kantor Pajak. PBB sudah merupakan anggaran otonomi daerah. Penilaian yang dilakukan seksi ekstensifikasi ialah dimana penghasilan wajib pajak yang sudah terdaftar mengalami peningkatan penghasilan tetapi data menunjukkan tidak adanya peningkatan. Maka data wajib pajak yang memiliki masalah demikian datanya direvisi atau diperbaharui sesuai keadaan terbaru.

2. Tugastambahan:

a. Sensus Pajak

Dalam perpajakan ada kegiatan pendataan wajib pajak secara masal yang di jadwalkan setiap tahunnya oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu Sensus Pajak. Sensus Pajak merupakan proyek untuk Seksi Ekstensifikasi. Diluar proyek sensus pajak, tugas utama seksi ini adalah mencari potensi-potensi wajib pajak dalam perpajakan. Sensus pajak ini ada deadline dan target yang harus

---

<sup>7</sup>ibid

dipenuhi dalam waktu yang singkat untuk pendataan wajib pajak. Biasanya sensus pajak dilakukan pada bulan September sampai bulan November. Sensus pajak ini sasarannya adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak perusahaan.

b. Pembayaran SPT tahunan

Pembayaran SPT tahunan dilakukan pada bulan maret, banyak wajib pajak pribadi atau perusahaan datang ke kantor pajak. Hal ini membuat suasana kantor tidak kondusif. Pembayaran SPT ini dilakukan oleh seksi pelayanan, tetapi karna ada batasan waktu dan tempat maka seksi ekstensifikasi turut membantu dan melayani wajib pajak yang ingin membayar SPT tahunan.

## **B. Pelaksanaan PKL**

Praktikan melaksanakan praktek kerja lapangan selama satu bulan. Terhitung sejak tanggal 25 Juni sampai dengan 25 Juli 2011. Kegiatan PKL ini dilakukan sesuai hari kerja yang berlaku di KPP Pratama Cakung Satu yaitu hari Senin hingga Jumat, dengan waktu kerja pukul 08.00-17.00 WIB.

Praktikan diberi tugas untuk mendata objek dan subjek pajak yang di amati oleh pegawai pajak di seksi ekstensifikasi. Praktikan mempelajari bagaimana cara mendata dari hasil pengamatan yang dilakukan pegawai pajak pada saat di lapangan. Data wajib pajak yang sudah diamati dan dilakukan proses pendataan

yang disebut perekaman data wajib pajak. Menginput semua identitas dan hasil pengamatan secara online dari Formulir Identitas Sensus (FIS). Praktikan diberi 500lembar FIS dari hasil pendataan sensus pajak 2012. Praktikan melakukan verifikasi data yang dituliskan oleh wajib pajak dilembar FIS. Berikut catatan harian kerja praktikan pada saat penginputan FIS di situs online BOSPN.

**Tabel III.1 Penginputan FIS/hari**

NO	Tanggal	Jumlah FIS/hari
1	26 juni 2013	25
2	27 juni 2013	25
3	28 juni 2013	20
4	1 juli 2013	25
5	2 juli 2013	25
6	3 juli 2013	50
7	5 juli 2013	20
8	8 juli 2013	50
9	9 juli 2013	50
10	10 juli 2013	50
11	11 juli 2013	50
12	12 juli 2013	20
13	15 juli 2013	50
14	16 juli 2013	25
15	17 juli 2013	25
Jumlah	12 hari	510 FIS

Data diolah oleh penulis

Pada tabel III.1 seperti diatas menggambarkan kegiatan praktikan bekerja, penginputan dilakukan setiap hari sejumlah 500FIS. Seksi ekstensifikasi diberi 2000 lembar FIS yang harus dikerjakan sebelum libur hari raya idul fitri, kurang

lebih target yang diberikan kepala kantor pada seksi ekstensifikasi hanya satu bulan. Ada 3 pegawai yang terdapat dibawah perintah kepala seksi ekstensifikasi, masing-masing juga diberikan 500lembar FIS per pegawai. Kami kerja saling membantu dan cukup santai. Bahkan praktikan bisa mengerjakan 510lembar FIS, praktikan turut membantu kerja pegawai yang lain untuk membantu sosialisasi agar suasana kerja lebih nyaman dengan para pegawai pegawai.

Tidak hanya sekedar menginput FIS kesitus BOSPN, tetapi praktikan juga

harus mempelajari identitas wajib pajak. berikut penjelasan lembar FIS :

dari





**Gambar III.2 FIS SPN 2012 hal.2**

Pada gambar III.1 dan gambar III.2 nampak pengisian lembar FIS SPN 2013 yang berisi identitas wajib pajak. Pada gambar III.1 praktikan mengecek apakah nomor objek pajak (NOP) yang diisi wajib pajak diisi atau tidak, lalu praktikan juga mengecek apakah wajib pajak mempunyai NPWP atau tidak. Dilembar kedua pada gambar III.2 praktikan memperhatikan identitas lainnya seperti wajib pajak sudah menikah atau belum dan mempunyai tanggungan anak atau saudara atau tidak, lalu praktikan memperhatikan pekerjaan dan pendapatan kotor wajib pajak. setelah itu praktikan menentukan apakah wajib pajak itu berada >PTKP atau <PTKP.

Disini ilmu praktikan pada saat mata kuliah perpajakan sangatlah perberan dimana praktikan menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan rumus dan perhitungan yang sudah dipelajari dan penentuan tarif pajak yang sudah diperbaharui setiap tahunnya. Berikut pembaharuan tarif untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak :

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan terbaru mengenai tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012 terhitung 1 Januari 2013 berlaku. Besarnya PTKP tersebut adalah:

- 1) Rp 24.300.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 2.025.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp 24.300.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- 4) Rp 2.025.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besaran PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini berlaku mulai 1 Januari 2009.<sup>8</sup>

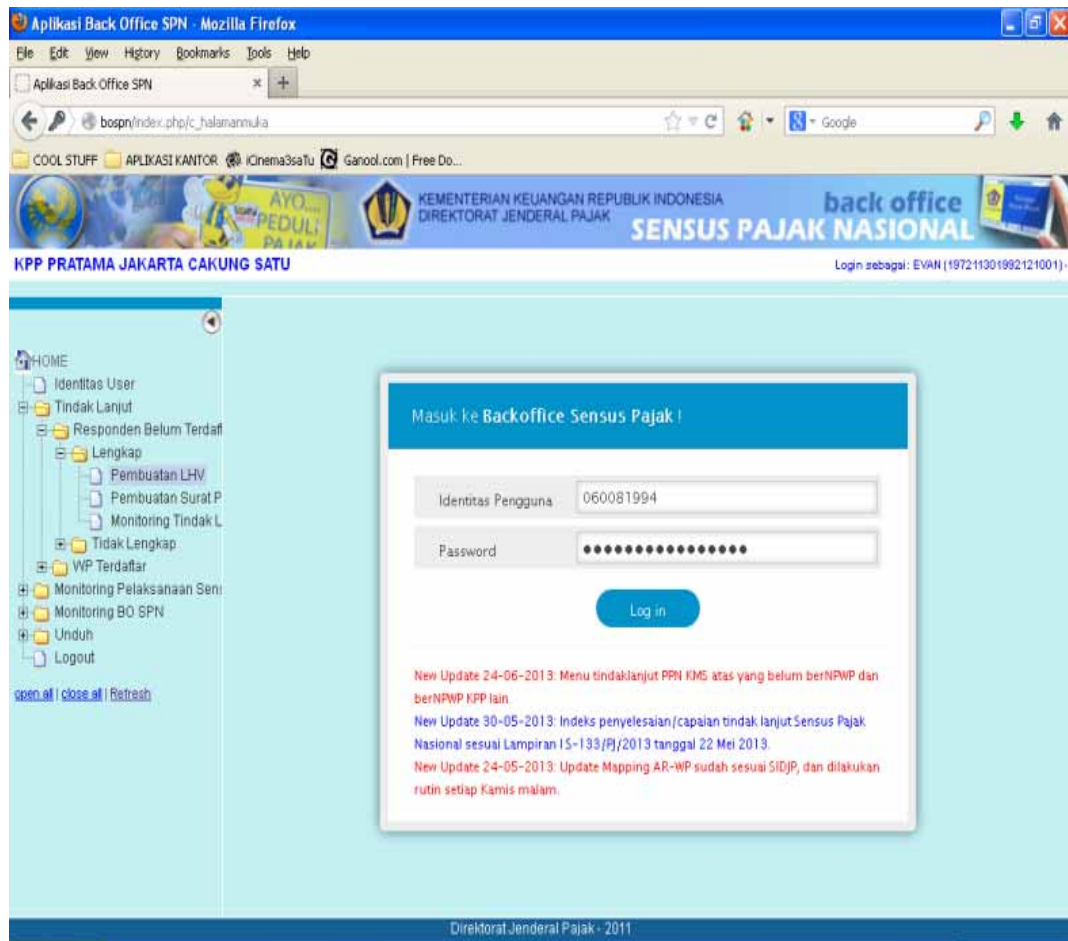
---

<sup>8</sup>-Penghasilan Tidak Kena Pajak [http://id.wikipedia.org/wiki/Penghasilan\\_tidak\\_kena\\_pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/Penghasilan_tidak_kena_pajak) (diakses 6 oktober 2013)

Dikarnakan untuk megefisienkan waktu bekerja ada peraturan dari kantor pajak yaitu pentuan <PTKP dan >PTKP itu ditetapkan dengan gaji diatas Rp2.050.000,-. Bila wajib pajak tersebut diatas mempunyai gaji sebesar Rp3.000.000,- dan tidak mempunyai NPWP maka wajib pajak tersebut dihimbaukan untuk membuat dan memiliki NPWP.

Data wajib pajak yang sudah diamati lalu dilakukan proses pendataan yang disebut perekaman data wajib pajak. menginput semua identitas dan hasil pengamatan secara online yaitu di situs Back Office Sensus Pajak Nasional (BOSPN) yang merupakan aplikasi penyimpanan data wajib pajak dari hasil sensus.

Di situs BOSPN ini terdapat username dan password yang harus dimasukan ketika login. Username dan password ini bersifat rahasia, setiap pegawai dikantor pajak mempunyai username dan password yang berbeda-beda dan bersifat pribadi dan rahasia. Disini praktikan dipercaya untuk menggunakan username dan password salah satu pegawai seksi ekstensifikasi dengan syarat tidak menyebar luaskan ke publik dan menjaga kerahasiaan data wajib pajak yang ada di situs BOSPN. Berikut gambar situs aplikasi BOSPN :



**Gambar III.3 login BOSPSP**

Pada gambar III.3 terdapat perintah masukan username dan password, maka praktikan login dengan menggunakan username dan password yang dimiliki pegawai seksi ekstensifikasi. Setelah berhasil login akan terdapat keterangan pada gambar sebagai berikut :

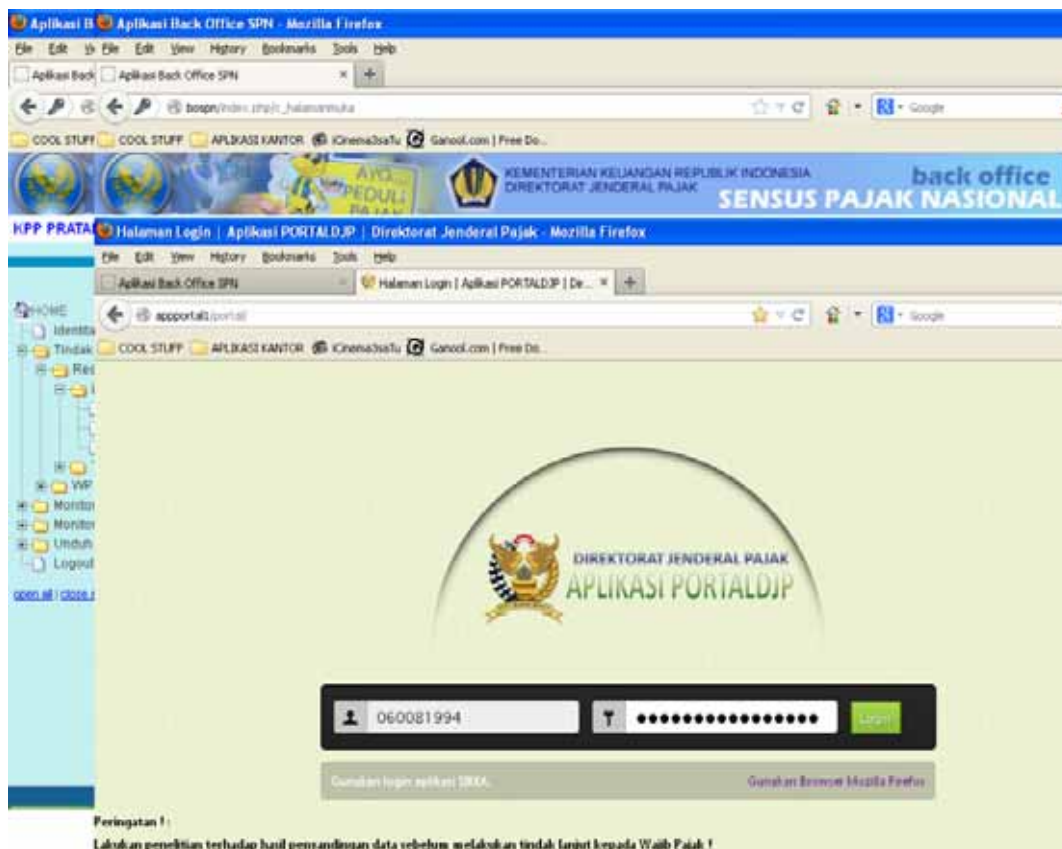
NO.	NOFIS	JENIS FIS	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN	NOMOR ST
1	004003537	OP	ASEP SYARIFUDIN	Jatinegara lio,BLOKKAW/NO: 139,RT/RW 011/003,KEL.JATINEGARA,KEC.CAKUNG,KAB.JAKARTA TIMUR	DOMISILI	
2	004003527	OP	MUHAMAD ALI	JATINEGARA LIO,BLOKKAW/NO: 124,RT/RW 011/003,KEL.JATINEGARA,KEC.CAKUNG,KAB.JAKARTA TIMUR	DOMISILI	
3	004003530	OP	ABDUL BARI	JATINEGARA LIO,BLOKKAW/NO: 158,RT/RW 011/003,KEL.JATINEGARA,KEC.CAKUNG,KAB.JAKARTA TIMUR	DOMISILI	
4	004003895	OP	WIAGINO	LUJUNG HARAPAN,BLOKKAW/NO: B,RT/RW 003/008,KEL.BAHAGIA,KEC.BABELAN,KAB.BEKASI	LOKASI	
5	004001158	OP	ATMA WIJAYA	kp cempuang,BLOKKAW/NO: ,RT/RW 003/002,KEL.SUKAMAJU,KEC.CIBUNGBULANG,KAB BOGOR	DOMISILI	

Gambar III.4 Pembuatan LHV

Pada gambar III.4 terdapat halaman muka yang berisi pembuatan lembaran himbuan verifikasi (LHV), yang dimaksudkan yaitu membuat lembar himbuan yang sudah diverifikasi. Jadi data yang ada di FIS SPN 2012, yang sudah amati tadi diseleksi wajib pajak nama saja yang tergolong diatas PTKP tetapi tidak mempunyai NPWP, diaplikasi inilah membuat surat himbuan yang ditujukan pada wajib pajak yang bersangkutan. Bila wajib pajak dibawah PTKP dan tidak mempunyai NPWP maka tidak ada himbauan untuk pembuatan NPWP tetapi diidentifikasi kembali data wajib pajaknya.

Dalam pengisian formulir sensus pajak banyak wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP tidak mencantumkan no NPWPnya. Guna mengantisipasi pencetakan NPWP double maka praktikan membantu mencari data wajib pajak

yang tidak lengkap di situs resmi sangat rahasia milik Direktorat Jendral Pajak (DJP) yakni PORTAL. Berikut situs aplikasi PORTAL tersebut :



**Gambar III.5 login PORTAL**

Sama seperti BOSPN situs ini juga meminta username dan password untuk login, dan praktikan menggunakan username dan password yang bersifat rahasia milik pegawai seksi ekstensifikasi. Setelah berhasil login akan muncul tampilan sebagai berikut :



**Gambar III.6 Aplikasi PORTAL DJP**

Praktikan melihat data dari lembar formulir identitas sensus sensus pajak nasional (FIS SPN), lalu mengamati kelengkapan data yang ditulis wajib pajak. Praktikan mengecek data wajib pajak di PORTAL pada gambar III.6, PORTAL adalah situs online berupa aplikasi yang dimiliki DJP untuk menyimpan data wajib pajak, lalu praktikan ditugaskan untuk mengecek valid atau tidaknya data wajib pajak. dengan mengklik toolbar data wajib pajak pada menu aplikasi PORTAL DJP. Setelah itu klik daftar wajib pajak, lalu cari wajib pajak berdasarkan nama, tanggal lahir, atau no NPWP, maka akan keluar data lengkap wajib pajak yang dicari.

Praktikan selain bekerja menginput data FIS SPN 2012, praktikan juga mengecek data wajib pajak yang tidak lengkap dalam pengajuan pembuatan



NPWP dengan wajib pajaknya tersebut datang langsung ke kantor pajak dengan membawa fotocopy KTP.

Pada saat proses pembuatan NPWP wajib pajak melampirkan fotocopy KTP untuk pengisian identitas. Pengisian kodepos pada alamat rumah sangat harus dicantumkan, tak banyak wajib pajak yang tidak mencantumkan kodepos, maka praktikan membantu mencari kodepos berdasarkan kelurahan dan kecamatan di wajib pajak berada melalui situs resmi kodepos indonesia.

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak tercapai apabila jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan, dan kegiatan intensifikasi pajak tercapai targetnya apabila jumlah penerimaan pajak meningkat dari Wajib Pajak yang telah terdaftar. Seksi Waskondan Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Cakung Satu telah cukup berhasil dalam mencapai target tersebut, karena jumlah Wajib Pajak baru dan jumlah penerimaan pajak terus meningkat. Namun KPP akan lebih berkerjasama lagi untuk menetapkan target yang lebih tinggi agar hasil yang dicapai dapat optimal, sehingga mengalami peningkatan yang signifikan.

### C. Kendala yang dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi seksi ekstensifikasi dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat, yang telah maupun yang belum menjadi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya dipajakan
2. Kurangnya kerjasamadengan pihak luar

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan menghadapi kendala-kendala dalam melaksanakan pekerjaan, antara lain:

1. Saat memulai praktek kerja lapangan praktikan merasa kurang dapat beradaptasi dengan para pegawai yang ada di Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Cakung Satu.
2. Pada saat pendataan banyak sekali data identitas wajib pajak yang tidak lengkap, sulit dimengerti, dan tidak valid.
3. Pendaftaran pembuatan NPWP secara online dikantor sering sekali terhambat dikarenakan koneksi internet yang suka mengalami trouble. Dan identitas wajib pajak yang tidak lengkap atau tidak terbaca dapat memperlama pekerjaan pembuatan NPWP.

#### D. Cara Mengatasi Kendala

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, cara pegawai seksi ekstensifikasi untuk mengatasinya yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak dapat disosialisasikan dan di beri arahan tentang pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>9</sup>

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi

---

<sup>9</sup>-Pengertian pajak <http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-pajak-menurut-ahli/> (diakses 26 desember 2013)

- c. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan)
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Dengan diberikannya pengertian dasar tentang pajak ini masyarakat akan mudah memahami tentang wajibnya membayar pajak, dan menjadi wajib pajak yang kooperatif.

2. Dalam kegiatan ekstensifikasi sangat dibutuhkan kerjasama dalam pengambilan data wajib pajak seperti dari Pemda atau perusahaan, maka pegawai ekstensifikasi memberi penyuluhan atau pendekatan secara persuasif agar pihak luar tersebut mau membantu memberikan data wajib pajak tersebut.

Berikut cara yang digunakan Praktikan untuk mengatasi kendala, adalah sebagai berikut:

1. Praktikan mencoba beradaptasi dengan para pegawai di dalam KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dengan cara bertanya maupun berbincang-bincang, dan praktikan menganggap mereka adalah orang yang berpengalaman yang dapat membimbing praktikan dalam pelaksanaan PKL di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

2. Bila mendapatkan data wajib pajak yang tidak lengkap, sulit dimengerti dan tidak valid, praktikan melakukan pengecekan di BOSPN dan Portal melalui online.
3. Menurut Per-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.<sup>10</sup> Maka diperaturan tersebut juga menjabarkan pembuatan NPWP bisa dilakukan datang langsung ke kantor pajak setempat atau mendaftarkan diri melalui situs [www.pajak.go.id/e-reg](http://www.pajak.go.id/e-reg) bisa diakses dimanapun. Pendaftaran NPWP secara online sering sekali mengalami kendala dikarenakan koneksi internet yang sering sekali mengalami trouble. Maka praktikan mencoba memakai wifi yang disalurkan dari gadget praktikan untuk proses pendaftaran NPWP.

---

<sup>10</sup>-E-reg NPWP <http://www.pajak.go.id/content/pendaftaran-npwp-online-eregistration> (diakses 26 desember 2013)

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah di dapatselama proses tatap muka perkuliahan, tidak hanya itu dengan adanya kegiatan ini maka mahasiswa di harapkan mampu mengenal lebih jauh kondisi serta gambaran dari lingkungan kerja sebuah instansi atau perusahaan.

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cakung I Pulo Gadung Jakarta Timur yang merupakan kantor pemerintah yang bertugas melayani perpajakan. KPP Pratama Cakung I Pulo Gadung Jakarta Timur beralamat di Jl. Pulo Buaran 6 Blk JJ No. 11 Jakarta Timur 13930 Telepon (021) 46826686, (021) 46826687 Fax (021) 46826685. Dalam kegiatan PKL praktikan ditempatkan di Seksi Ekstensifikasi. Praktikan melakukan kegiatan PKL selama satu bulan, yakni sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 25 Juli 2013. Waktu kerja praktikan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Berdasarkan pengalaman Praktikan selama melaksanakan praktek kerja lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktikan mendapatkan ilmu atau pengalaman baru yang

sebelumnya belum pernah praktik dan dapat kanda dalam perkuliahan tatap muka, seperti mendaftarkan wajib pajak untuk pembuatan NPWP.

2. Praktek kerja lapangan memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang sesungguhnya kepada praktikan.
3. Kendala yang dihadapi Praktikan selama praktek kerja lapangan ini yakni pada saat pendataan yang dilakukan secara online mengalami kendala pada koneksi internet, dan juga data identitas wajib pajak yang tidak valid.
4. Cara mengatasi kendala-kendala selama melakukan praktek adalah menggunakan koneksi wifi yang tersambung pada gadget praktikan dan dengan berkomunikasi mendiskusikan hal tersebut kepada pegawai tentang data identitas wajib pajak dan meminta izin mencari sendiri di BOSPN dan portal dengan login menggunakan ID dan Password pegawai.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan PKL dan untuk pelaksanaan PKL yang jauh lebih baik lagi bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa yang berminat untuk melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal Pajak, maka praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna dikemudian hari. Adapun saran yang diberikan praktikan ialah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL, hendaknya benar benar mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. Memilih tempat PKL yang sesuai dengan minat masing-masing dan berkonsultasi dengan dosen, kaprodi konsentrasi atau dosen

pembimbing terlebih dahulu mengenai tempat PKL yang dituju. Selama pelaksanaan PKL, hendaknya mahasiswa dapat menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan tempat PKL.

2. Menjalin komunikasi yang baik dengan pegawai yang ada di kantor.
3. Berinisiatif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan jangan malu bertanya jika menghadapi kesulitan.
4. Berkoordinasi aktif dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Selain itu, berfikir kreatif ditengah keterbatasan peralatan dan perlengkapan yang ada. Dan tidak menjadikan hal tersebut untuk tidak produktif dalam bekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

Siti Resmi. "*Perpajakan Teori dan Kasus*". Jakarta: Salemba Empat, 2009

Mardiasmo. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Jakarta: Andi, 2013

### Internet

*Pengertian struktur organisasi*. (<http://www.organisasi.org>). (Diakses tanggal 06 November 2013).

<http://www.pajak.go.id/strukturorg/kpp%20pratama.png>. (Diakses tanggal 21 November 2013).

## Lampiran 1 Surat Izin Praktek



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU**

JALAN PULOBUARAN VI BLOK JJ NO. 11 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13930  
 TELEPON (021) 46826683, 46826687 FAKSIMILI (021) 46826685

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pegawai sebagai berikut:

Nama : Irvan RY  
 NIP : 196402031989021001  
 Pangkat/Gol. : Penata/IIIc  
 Jabatan : Kasubbag Umum

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Sulast Musiam  
 NIM : 8105108034  
 Jurusan : Ekonomi dan Administrasi  
 Universitas : Universitas Negeri Jakarta
2. Nama : Hellen Octavia  
 NIM : 8105108079  
 Jurusan : Ekonomi dan Administrasi  
 Universitas : Universitas Negeri Jakarta

telah melaksanakan Magang/Praktek Kerja Lapangan dari tanggal 25 Juni s.d. 25 Juli 2013 dan telah selesai melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, <sup>26</sup> Juli 2013  
 Kasubbag Umum,

  
 Irvan R. Y.  
 NIP196402031989021001



KP. 0401/2013

## Lampiran 2 Surat Pemberian Izin



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU**

JALAN PULOBUARAN VI BLOK JJ NO. 11 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13930  
 TELEPON (021) 46826683, 46826687 FAKSIMILI (021) 46826685

---

Nomor : S-3273/WPJ.20/KP.04/2013  
 Sifat : Biasa  
 Hal : Pemberian Izin Praktek Kerja Lapangan

26 Juli 2013

Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  
 Universitas Negeri Jakarta  
 Jalan Rawamangun Muka  
 Jakarta-13220

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 1481/UN39.12/PL/2013 tanggal 25 Maret 2013 hal Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan, atas:

1. Nama : Sulast Musiam  
 NIM : 8105108034  
 Jurusan : Ekonomi dan Administrasi  
 Universitas : Universitas Negeri Jakarta
2. Nama : Hellen Octavia  
 NIM : 8105108079  
 Jurusan : Ekonomi dan Administrasi  
 Universitas : Universitas Negeri Jakarta

dengan ini Kepala KPP Pratama Jakarta Cakung Satu Memberikan Izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk Praktek Kerja Lapangan pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sepanjang bahan2 keterangan yang didapat digunakan untuk kepeertuan akademis yang tidak untuk dipublikasi dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.


Setalah selesai melaksanakan penelitian mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft copy dimakasud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan @pajak.go.id.

Kepala Kantor  
  
 Rizaldi Kurniawan Ridwan  
 NIP 197004301995031003



KP. 0401/2013

## Lampiran 3 Daftar Hadir Mahasiswa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285  
www.unj.ac.id/fe

**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**  
**2**  
**..... SKS**

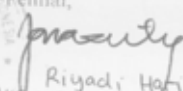
Nama : Hellen Octavia  
No. Registrasi : 8105108079  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi Koperasi NR'10  
Tempat Praktik : KPP Pratama cakung satu  
Alamat Praktik/Telp : Jl. Pulo Buaran VI Blok 33 no. 11  
KIP Jakarta Timur (021) 48826687

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Selasa, 25 - 06 - 2013	1. f	
2.	Rabu, 26 - 06 - 2013	2. f	
3.	Kamis, 27 - 06 - 2013	3. f	
4.	Jum'at, 28 - 06 - 2013	4. f	
5.	Senin, 01 - 07 - 2013	5. f	
6.	Selasa, 02 - 07 - 2013	6. f	
7.	Rabu, 03 - 07 - 2013	7. f	
8.	Kamis, 04 - 07 - 2013	8. f	Izin Pembekalan
9.	Jum'at, 05 - 07 - 2013	9. f	
10.	Senin, 08 - 07 - 2013	10. f	
11.	Selasa, 09 - 07 - 2013	11. f	
12.	Rabu, 10 - 07 - 2013	12. f	
13.	Kamis, 11 - 07 - 2013	13. f	
14.	Jum'at, 12 - 07 - 2013	14. f	
15.	Senin, 15, 07 - 2013	15. f	


Catatan :

Jakarta, 25 - Juli - 2013

Penilai,



Riyadi Hori Prasetya  
NIP : 197510172002121001





Building  
Future  
Leaders

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

www.unj.ac.id/fe

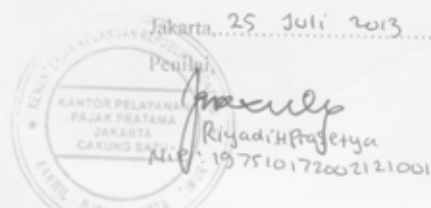
DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
...2... SKS

Nama : Hallen Octavia  
No. Registrasi : 0105108079  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi Koperasi NR'10  
Tempat Praktik : KPP Pratama Cakung Sate  
Alamat Praktik/Telp : Jl. Pulo Gnaran VI Blok 33 no.11  
KIP JAKARTA TIMUR (021-46826687)

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Selasa, 16 - 07 - 2013	1.	
2.	Rabu, 17 - 07 - 2013	2.	
3.	Kamis, 18 - 07 - 2013	3.	
4.	Jum'at, 19 - 07 - 2013	4.	
5.	Senin, 22 - 07 - 2013	5.	
6.	Selasa, 23 - 07 - 2013	6.	
7.	Rabu, 24 - 07 - 2013	7.	
8.	Kamis, 25 - 07 - 2013	8.	
9.		9. ....	
10.		10. ....	
11.		11. ....	
12.		12. ....	
13.		13. ....	
14.		14. ....	
15.		15. ....	

Jakarta, 25 Juli 2013


Penilai



NIP: 197510172002121001

Catatan :

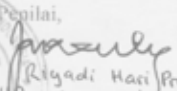
## Lampiran 4 Penilaian PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285  
 www.unj.ac.id/fe

**PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
 .....<sup>1</sup> SKS


Nama : Hellen Octavia  
 No.Registrasi : 8105102073  
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi Keperawatan NR-10  
 Tempat Praktik : KLP Prayana Cahaya Suka  
 Alamat Praktik/Telp : 11. Pulo Amaran

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 50-100	KETERANGAN																				
1	Kehadiran	80	1.Keterangan Penilaian : <table border="1"> <tr> <td>Skor</td> <td>Nilai</td> <td>Predikat</td> </tr> <tr> <td>80-100</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>70-79</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60-69</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>55-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> </tr> </table> 2.Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif  Nilai Rata-rata : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\frac{855}{10 \text{ (sepuluh)}} = 85,5</math></td> </tr> </table> Nilai Akhir : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">85,5</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Angka bulat</td> <td style="text-align: center;">huruf</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Predikat	80-100	A	Sangat baik	70-79	B	Baik	60-69	C	Cukup	55-59	D	Kurang	$\frac{855}{10 \text{ (sepuluh)}} = 85,5$	85,5	A	Angka bulat	huruf
Skor	Nilai	Predikat																					
80-100	A	Sangat baik																					
70-79	B	Baik																					
60-69	C	Cukup																					
55-59	D	Kurang																					
$\frac{855}{10 \text{ (sepuluh)}} = 85,5$																							
85,5	A																						
Angka bulat	huruf																						
2	Kedisiplinan	80																					
3	Sikap dan Kepribadian	90																					
4	Kemampuan Dasar	85																					
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	85																					
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	80																					
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	95																					
8	Aktivitas dan Kreativitas	85																					
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	85																					
10	Hasil Pekerjaan	90																					
Jumlah		855																					

Jakarta, 25 Juli - 2013  
 Penilai,  
  
 Rigadi Hari Prusetya  
 NRP : 197510172002121001



## Lampiran 5FIS SPN 2013

No. Formulir	004003708	Kategori	<input type="checkbox"/>	Orang Pribadi
 <b>SENSUS PAJAK NASIONAL 2013</b> Kanwil DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu		<b>RAHASIA</b>		
(Harap diisi dengan huruf balok)				
Cluster	NOP	21 72 060 002 019 0540 0	Subjek ke. <input type="checkbox"/>	
<b>A. SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)</b>				
1a. Nama *) (Sesuai KTP)	ARWANSYAH		1b. Gelar	
2. Tempat/Tgl. Lahir *)	JAKARTA	/ 20-2-03 (dd-mm-yyyy)	3. Jenis Kelamin *)	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
4. Alamat Tempat Tinggal *) (Sesuai KTP):	UR SEMBATAN		b. Blok/Lt/Kav/No	54
a. Jalan	13 / 01	d. Kelurahan	PENGLINGBAM	
c. RT/RW	JAKTIM	g. Kode Pos	13940	
f. Kota/Kabupaten	544107517634		e. Kecamatan	CAKUNG
5. No. Pelanggan PLN	(apabila mempunyai lebih dari satu ID Pelanggan, masukkan salah satu)			
6. No. Telepon	-	Ext.	7. No. Handphone	08128305605
8. No. Faksimile	-	9. Email		
10. Kewarganegaraan *)	<input checked="" type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA	Negara Asal	
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)	No. Identitas *)		(NIK/PASPOR/KITAS)	
11. WP Terdaftar *)	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya	NPWP *)	<input type="checkbox"/>
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)				
12. Menyampaikan SPT Tahunan *)	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya	Tahun pajak terakhir	
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)				
13. PKP Terdaftar *)	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya	14. Kedudukan *)	<input type="checkbox"/> Domisili <input type="checkbox"/> Lokasi
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)	(Beri tanda X pada kotak yang sesuai) <span style="float: right; font-size: x-small;">Diisi oleh Petugas</span>			
15. Alamat Korespondensi *) (Diisi apabila tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera pada KTP)				
a. Jalan			b. Blok/Lt/Kav/No	
c. RT/RW	/	d. Kelurahan		
f. Kota/Kabupaten			e. Kecamatan	
g. Kode Pos				
<b>B. LOKASI SENSUS (TEMPAT TINGGAL/USAHA)</b>				
16. Status *)	<input checked="" type="checkbox"/> Milik Sendiri	<input type="checkbox"/> Sewa	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan	
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)				
17. Ada kegiatan membangun sendiri (> 300 m2) *)	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya	Luas Bangunan	m2
(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)				
Apabila bukan milik sendiri, silakan isi keterangan di bawah ini :				
18. Nama Pemilik *)			<input type="checkbox"/> Individu	<input type="checkbox"/> Badan
19. No. Identitas	(Individu - NPWP atau NIK / Badan - NPWP)			
20. Alamat Tempat Tinggal (Individu - sesuai KTP / Badan - sesuai tempat kedudukan):				
a. Jalan			b. Blok/Lt/Kav/No	
c. RT/RW	/	d. Kelurahan		
f. Kota/Kabupaten			e. Kecamatan	
g. Kode Pos				
21a. Pembayaran PPh atas	<input type="checkbox"/> Tidak Tahu	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada Pembayaran	





## Lampiran 6 Aplikasi BOSPN

The screenshot displays the web application interface for the Aplikasi Back Office SPN. The browser window title is "Aplikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL "bospn/index.php/c\_halamanmuka". The page header includes the logo of the Directorate General of Taxation and the text "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK" and "back office SENSUS PAJAK NASIONAL". The page content is divided into a left sidebar menu, a central login form, and a footer.

**Navigation Menu (Left Sidebar):**

- HOME
- Identitas User
- Tindak Lanjut
  - Responden Belum Terdaftar
    - Lengkap
      - Pembuatan LHV
      - Pembuatan Surat P
      - Monitoring Tindak L
    - Tidak Lengkap
  - WP Terdaftar
- Monitoring Pelaksanaan Sensus
- Monitoring BO SPN
- Unduh
- Logout

[open all](#) | [close all](#) | [Refresh](#)

**Central Login Form:**

Masuk ke Backoffice Sensus Pajak I

Identitas Pengguna:

Password:

[Log in](#)

**News/Updates (Bottom of Form):**

- New Update 24-06-2013: Menu tindak lanjut PPN KMS atas yang belum berNPWP dan berNPWP KPP lain.
- New Update 30-05-2013: Indeks penyelesaian/capaian tindak lanjut Sensus Pajak Nasional sesuai Lampiran I S-133/PJ/2013 tanggal 22 Mei 2013.
- New Update 24-05-2013: Update Mapping AR-WP sudah sesuai SDGP, dan dilakukan rutin setiap Kamis malam.

**Footer:** Direktorat Jenderal Pajak - 2011

Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATA Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU Login sebagai: EVAN (197211)

**Pembuatan LHV**

1 2 3 Last Tahun Sensus: 2012 Cluster: Pilih Cluster

NO.	NOFIS	JENIS FIS	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN	NOMOR ST
1	004003537	OP	ASEP SYARIFUDIN	Jatinegara Ilo,BLOK/KAWNO: 139,RT/RW 011/003,KEL.JATINEGARA,KEC.CAKUNG,KAB.JAKARTA TIMUR	DOMISILI	
2	004003527	OP	MUHAMAD ALI	JATINEGARA LJO,BLOK/KAWNO: 124,RT/RW 011/003,KEL.JATINEGARA,KEC.CAKUNG,KAB.JAKARTA TIMUR	DOMISILI	
3	004003530	OP	ABDUL BARI	JATINEGARA LJO,BLOK/KAWNO: 158,RT/RW 011/003,KEL.JATINEGARA,KEC.CAKUNG,KAB.JAKARTA TIMUR	DOMISILI	
4	004003895	OP	WAGINO	UJUNG HARAPAN,BLOK/KAWNO: B,RT/RW 003/008,KEL.BAHAGIA,KEC.BABELAN,KAB.BEKASI	LOKASI	
5	004001158	OP	ATMA WJAYA	Kp.cempuang,BLOK/KAWNO: ,RT/RW 003/002,KEL.SUKAMAJU,KEC.CIBUNGBULANG,KAB.BOGOR	DOMISILI	

open all | close all | Refresh

Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATA Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU Login sebagai: EVAN (197211)

Registrasi Potensi Pajak Pembayaran Pelaporan Form Pengamatan

Kode Cluster 008	Kawasan F- JALAN PROTOKOL	NOP 317206000101500840	Nama Responden AMINATUZ ZUHRIYAH	Supervisor NIP. 060090943	Petugas Sensus NIP. 060110626	Petugas Rekam NIP. 060072016	Petugas Validasi NIP. 0601128
No Formulir 004001590	Kategori 1		Tanggal Responden 24-JUN-12	Tanggal Supervisi 24-JUN-12	Tanggal Sensus 24-JUN-12	Tanggal Rekam 25-SEP-12	Tanggal Validasi 15-OCT-

**A. SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)**

1a. Nama	AMINATUZ ZUHRIYAH	1b. Gelar	
2. Tempat/Tgl. Lahir	purworejo/15-OCT-88	3. Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> P
4. Alamat Tempat Tinggal			

open all | close all | Refresh

Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATA Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU Login sebagai: EVAN (197211)

Registrasi Potensi Pajak Pembayaran Pelaporan Form Pengamatan

Kode Cluster	Kawasan F- JALAN PROTOKOL	NOP 317206000101500840	Nama Responden AMINATUZ ZUMRIYAH	Supervisor NIP. 060090943	Petugas Sensus NIP. 060110626	Petugas Rekam NIP. 060072016	Petugas Validasi NIP. 0601128
No Formulir 004001590	Kategori 1		Tanggal Responden 24-JUN-12	Tanggal Supervisi 24-JUN-12	Tanggal Sensus 24-JUN-12	Tanggal Rekam 25-SEP-12	Tanggal Validasi 15-OCT-
6. No. Telepon		Ext.		7. No. Handphone	089790048		
8. No. Faksimile				9. Email			
10. Kewarganegaraan	<input checked="" type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA Negara Asal						
	No. Identitas	KTP : 3306115510000002					
11. WP Terdaftar	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak		NPWP				

open all | close all | Refresh

Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATA Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU

Login sebagai: EVAN (197211)

HOME

- Identitas
- Tindakan
  - COOL STUFF
  - APLIKASI KANTOR
  - iCinema3saTu
  - Ganool.com | Free Do...
- Respon
  - Responden Belum Terdaftar
  - Lengkap
    - Pembuatan LHV
    - Pembuatan Surat P
    - Monitoring Tindak L
  - Tidak Lengkap
  - WP Terdaftar
  - Monitoring Pelaksanaan Sem
  - Monitoring BO SPN
  - Unduh
  - Logout

open.all | close.s

open.all | close.all | Refresh

B. Lokasi Sensus (Tempat Tinggal/Usaha)

16. Status  Milik Sendiri  Sewa  Lainnya,

17. Ada kegiatan membangun sendiri  Ya  Tidak Luas Bangunan 0

Apabila bukan milik sendiri, silakan isi keterangan di bawah ini :

18. Nama Pemilik ibah  Individu  Badan

19. No. Identitas

20. Alamat Tempat Tinggal

a. Jalan Kayu manis b. Blok/Lt/Kav/No

c. RT/RW / d. Kelurahan e. Kecamatan

f. Kota/Kabupaten g. Kode Pos

21 a. Pembayaran PPh atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan  Ada  Tidak ada  Tidak Tahu

Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATA Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU Login sebagai: EVAN (197211)

HOME

- Identitas
- Tindakan
  - Respon
  - Waktu
  - WP
  - Monitor
  - Monitor
  - Unduh
  - Logout
- open.all | close.all
- WP
  - Monitor
  - Monitor
  - Unduh
  - Logout
- HOME
  - Identitas User
  - Tindakan Lanjut
  - Responden Belum Terdaftar
    - Lengkap
      - Pembuatan LHV
      - Pembuatan Surat P
      - Monitoring Tindakan Lanjut
    - Tidak Lengkap
    - WP Terdaftar
    - Monitoring Pelaksanaan Sensus
    - Monitoring BO SPN
    - Unduh
    - Logout
  - open.all | close.all | Refresh

C. KONDISI SUBJEK PAJAK SENSUS (KEGIATAN USAHA)

22. Status	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Kawin <input type="checkbox"/> Kawin			
23. Tanggungan	<input type="checkbox"/> Anak	Jumlah	<input type="checkbox"/> Orang Tua	Jumlah
	<input type="checkbox"/> Saudara	Jumlah	<input type="checkbox"/> Lainnya	Jumlah
24. Sumber Penghasilan :				
a. Pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta Pegawai <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI			
b. Usaha	<input type="checkbox"/> Industri	Merk usaha		Jenis Usaha
KLU	<input type="checkbox"/> Dagang	Merk usaha		Jenis Usaha
	<input type="checkbox"/> Jasa	Merk usaha		Jenis Usaha
	<input type="checkbox"/> Lainnya	Merk usaha		Jenis Usaha

Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATA Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF APLIKASI KANTOR iCinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU Login sebagai: EVAN (197211)

	Lembar, Sublembar	Jumlah	Merk	Tipe
<b>D. KESIMPULAN</b>				
			Tidak Valid	
36.	Keyakinan atas Kualitas Data Pengamatan (Ber tanda X pada angka yang sesuai dengan skala 1-5)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
37.	Kesimpulan Hasil Pengamatan (Ber tanda X pada kotak yang sesuai, boleh lebih dari satu)		<input checked="" type="checkbox"/>	Penghasilan < PTKP <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	Penghasilan > PTKP <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	Terdapat Penyisihan BKP/UKP <input type="checkbox"/>



Applikasi B Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Applikasi Back Office SPN x +

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF COOL STUFF APLIKASI KANTOR Kinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
**SENSUS PAJAK NASIONAL**


KPP PRATAI KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU Login sebagai: EVAN (197211)

HOME HOME

- Identita Identitas User
- Tindak Tindak Lanjut
- Res Responden Belum Terdaftar
  - Lengkap
    - Pembuatan LHV
    - Pembuatan Surat P
    - Monitoring Tindak L
  - Tidak Lengkap
  - WP WP Terdaftar
- Monitor Monitoring Pelaksanaan Seni
- Monitor Monitoring BO SPN
- Unduh Unduh
- Logout Logout

[open.all](#) | [close.s](#) | [open.all](#) | [close.all](#) | [Refresh](#)

**NEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH JAKARTA TIMUR**



**KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU**

LAPORAN HASIL VERIFIKASI  
DALAM RANGKA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
SECARA JABATAN

Nomor Laporan	:	<input type="text" value="&lt;AUTO&gt;"/>	<input type="text" value="JWPJ.2013P.04/SPN"/>	<input type="text" value="2013"/>
Tanggal Laporan	:	<input type="text" value="26/07/2013"/>	<a href="#">form at. ds/mm/xxxx</a>	
Nama Wajib Pajak	:	AMINATUZ ZUHIRYAH		
Alamat	:	KP PULO JAHE		

Direktorat Jenderal Pajak - 2011

Terdapat Penyisihan BKP/UKP



## Lampiran 7 Aplikasi Portal

The screenshot shows two browser windows. The top window is titled 'Aplikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox' and displays the 'back office SENSUS PAJAK NASIONAL' banner. The bottom window is titled 'Halaman Login | Aplikasi PORTALDJP | Direktorat Jenderal Pajak - Mozilla Firefox' and shows the login interface. The login form includes a username field with the value '060081994', a password field with masked characters, and a green 'Login' button. Below the form, there are two instructions: 'Gunakan login aplikasi SIEKA.' and 'Gunakan Browser Mozilla Firefox'. At the bottom, a warning message reads: 'Peringatan !: Lakukan penelitian terhadap hasil penyandingan data sebelum melakukan tindak lanjut kepada Wajib Pajak !'

Applikasi B Applikasi Back Office SPN - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN

bospn/index.php/c\_halamanmuka

COOL STUFF COOL STUFF APLIKASI KANTOR iKinema3saTu Ganool.com | Free Do...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

back office  
SENSUS PAJAK NASIONAL

KPP PRATA Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Applikasi Back Office SPN

http://appportal1/portal/

HOME

Identita

Tindak

Res

WP

Monitor

Monitor

Unduh

Logout

www.id | close

APLIKASI PORTAL DJP

BERANDA | EVAN | LOG C

DATA WAJIB PAJAK DATA PENERIMAAN DATA UNIT KERJA APLIKASI ONLINE APLIKASI KONFERENSI PENGAWASAN DATA PIHAK KETIGA

Masterfile Wajib Pajak

Monitoring Penyampaian e-SPT melalui e-Filing

Data Pembayaran PBB per NOP

Monitoring PWPM

Data PBB Perkebunan

Monitoring Pencabutan WP PKP

Daftar Wajib Pajak dengan KLU Error

Tanda Terima SIDJP

Wajib Pajak PP4G

APLIKASI BARU BULAN INI (6) :

NAMA APLIKASI	MDU
Data PP 01 / 2012	Menu Data Pihak Ketiga
Penyandingan Data SP2D vs SPT	Menu Data Pihak Ketiga / Penyandingan
Penyandingan Data Pagu APBN dengan SP2D	Menu Data Pihak Ketiga / Penyandingan
Data Penyandingan Bulu V PBB vs NPWP dan HARTA	Menu Data Pihak Ketiga / Penyandingan
Data Penyandingan Harga Lelang vs Onset SPT	Menu Data Pihak Ketiga / Penyandingan
Data Wajib Pajak PP 4G/2013	Menu Data Wajib Pajak

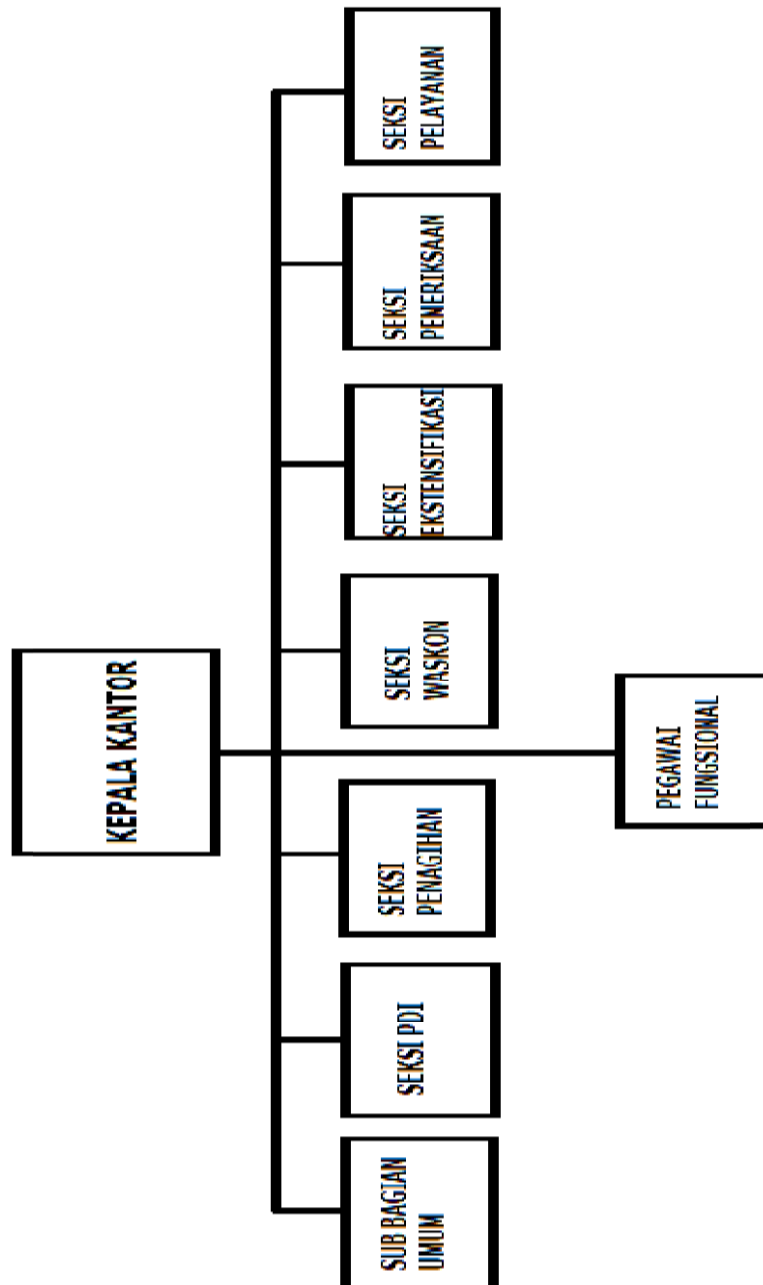
## Lampiran 8 Logo Perusahaan







## Lampiran 9 struktur organisasi



Lampiran 10 Jadwal Kegiatan PKL

**JADWAL KEGIATAN PKL**  
**FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2013**

No	Bulan Kegiatan	2013									
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Pendaftaran PKL										
2.	Kontak dengan Perusahaan untuk penempatan PKL										
3.	Surat permohonan PKL ke Perusahaan										
4.	Pelaksanaan Program PKL										
8.	Penulisan Laporan PKL										
9.	Penyerahan Laporan PKL										
10.	Koreksi Laporan PKL										
11.	Penyerahan Koreksi Laporan PKL										
12.	Batas akhir penyerahan Laporan PKL										